



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gedung Peradilan No. 4, Gedung
Jaya No. 1001

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Nama : VEHAYADITRIANDYANI

NIK : 197102000500000

Tempat : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Unit Kerja : RUMAH SAKIT LUTAN DUREN

Sub Unit Kerja : D. ROKO

Jabatan : D. ROKO

Jenis Laporan : Khusus - Awal Masa Jabat

Tanggal Kirim : 28 Mei 2024

Cara dan Waktu Verifikasi Administrasi :

- On Sight
- Tidak On Sight



(*) Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur TAPAK dan cara melakukan verifikasi administrasi, kunjungi :

Website : <http://PP.LIRPA> | Call Center : 180 | Email : info@pp.go.id | tiket.pajak.go.id

Instansi : www.korupsi.go.id | www.korupsi.go.id | www.korupsi.go.id | www.korupsi.go.id



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : PUTRI BULKIS
NIK : 1571015205670021
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Unit Kerja : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
Sub Unit Kerja : BIDANG KEPERAWATAN, REHABILITASI,
STANDARISASI DAN JAMINAN KESEHATAN
Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan : Periodik - 2020
Tanggal Kirim : 21 Maret 2021

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

2020



IKHTISAR LHKPN a.n AMRI
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2020)
NIK 1571070305630061

1. DATA PRIBADI

Nama : AMRI
NIK : 1571070305630061
No KK : 1571072201089035
NPWP : 085201093331000
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir : GELANGGANG/3 Mei 1963
Status Nikah : Menikah
Agama : ISLAM
Alamat : Jl. Beradat RT 16 no 98 kelurahan kenali besar, ALAMBARAJI, KOTA JAMBI, JAMBI
Nomor Handphone : 081366469638
Email : amri_semm@yahoo.co.id
NHK : 743572
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Jabatan : KEPALA BAGIAN - BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN - RUMAH SAKIT JINWA DANERBAH
Tanggal Lapo : 31 Desember 2020
Tanggal Kirim : -
Status : Draft

1. DATA PRIBADI

Nama	: AMRI
NIK	: 1571070305630061
No KK	: 1571072201089035
NPWP	: 085201093331000
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: GELANGGANG/3 Mei 1963
Status Nikah	: Menikah
Agama	: ISLAM
Alamat	: Jl. Beradat RT 16 no 98 kelurahan kenali besar, ALAMBARAJU, KOTA JAMBI, JAMBI
Nomor Handphone	: 081366469638
Email	: amri_semm@yahoo.co.id
NHK	: 743572
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Jabatan	: KEPALA BAGIAN - BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN - RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
Tanggal Laport	: 31 Desember 2020
Tanggal Kirim	: -
Status	: Draft

IKHTISAR LHKPN a.n AMRI
(Jenis Laporan - Tahun: Perodik – 2020)
NIK 1571070305630061



2020



2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	NURHAYATI	ISTRI	SUNGAI MANAU, 10 Maret 1970 / PEREMPUAN	PNS	Jl. Beradat RT 16 no 98 kelurahan kenali besar, Kelurahan KENALI BESAR, Kecamatan ALAMBARAJO, KOTA JAMBI, Provinsi JAMBI
2	RIZKI ANANDA	ANAK BUKAN TANGGUNGAN	JAMBI, 11 Agustus 1995 / LAKI-LAKI	HONORER	Jl. Beradat RT 16 no 98 kelurahan kenali besar, Kelurahan KENALI BESAR, Kecamatan ALAMBARAJO, KOTA JAMBI, Provinsi JAMBI

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	KEPALA BAGIAN	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jalan / No : JL BERADAT RT 16 NO 98 KENALI BESAR Kel. / Desa : KENALI BESAR Kecamatan : ALAM BARAJO Kab. / Kota : KOTA JAMBI Prov. / Negara : JAMBI / INDONESIA	Tanah: 450 m ² Bangunan: 150 m ²	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: 6947 Atas Nama: LAINNYA (SYAHRIL) Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: TEMPAT TINGGAL Tahun Perolehan: 2007	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	BARU
Sub Total					Rp. 200.000.000	

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

**2020**

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOBIL Merk : RUSH TOYOTA Model : G Tahun Pembuatan : 2012 No. Pol. / Registrasi : BH 1204 HE	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2012	Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000	BARU
Sub Total				Rp. 125.000.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.4. SURAT BERTAGIH

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : MANDIRI	Nomor : 1100004527930 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI		Rp. 130.000.000	BARU



URAIAN		INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	NILAI PELAPORAN KETERANGAN
2	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BANK 9 JAMBI	Nomor : 10422047 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 100.000.000	BARU
Sub Total				Rp. 230.000.000	

4.6. HARTA LAINNYA

URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	NILAI SALDO HUTANG KETERANGAN
	Sub Total		Rp. 0	

4.7. HUTANG

URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
	Sub Total		Rp. 0	Rp. 0

**5. PENERIMAAN
5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN**

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 161.522.400	Rp. 36.000.000
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0



JENIS PENERIMAAN		PENYELENGGARA NEGARA		PASANGAN
3	Honorarium	Rp. 44.400.000		Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 12.000.000		Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0		Rp. 0
Sub Total		Rp. 217.922.400		Rp. 36.000.000

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

JENIS PENERIMAAN		TOTAL PENERIMAAN KAS	
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga		Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa		Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya		Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta		Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya		Rp. 0
Sub Total			Rp. 0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA



JENIS PENGELUARAN		
1	Penerimaan Hibah	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

6. PENGELUARAN
6.1. PENGELUARAN RUTIN

JENIS PENGELUARAN		
1	Biaya Kumpul Yanggi (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 66.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 1.200.000
3	Pembayaran Pajak (antara lain PPh, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 4.000.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 1.500.000
Sub Total		Rp. 72.700.000

**2020****6.2. PENGELUARAN HARTA**

JENIS PENGELUARAN		TOTAL NILAI PENGELUARAN
NO		
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

JENIS PENGELUARAN		TOTAL NILAI PENGELUARAN
NO		
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------

**8. TOTAL HARTA KEKAYAAN**

TOTAL HARTA		TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
NO			
1	Rp. 555.000.000	Rp. 0	Rp. 555.000.000

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAKARIA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 730364

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/96 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/120 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/76.5 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 300.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 36.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 198.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.536.198.000

III. HUTANG

Rp. 20.700.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.515.498.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.